



**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda Kab. Lamongan) memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menyelenggarakan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, Bappelitbangda Kab.Lamongan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan memandang pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat kompleksitas dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah, pengelolaan risiko menjadi landasan yang krusial dalam memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kab.Lamongan.

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan telah mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Kebijakan pengelolaan risiko perangkat daerah ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi internal Bappelitbangda Kab.Lamongan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penyusunan laporan pengelolaan risiko Bappelitbangda Kab.Lamongan menjadi suatu keharusan guna mengevaluasi kinerja pengelolaan risiko yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Tahun 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Berdasarkan hasil survey persepsi yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh gambaran tentang kondisi lingkungan pengendalian pada awal periode tahun 2025. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa aspek **“Kepemimpinan yang kondusif”** merupakan aspek dengan nilai tertinggi dalam lingkungan pengendalian saat ini. Secara umum, semua aspek pada lingkungan pengendalian saat ini sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

**Tabel 1. Hasil Survey Persepsi
Kondisi Lingkungan Pengendalian**

| No | Aspek | Nilai | Kategori |
|----|---|-------|--|
| A | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | 3.50 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |
| B | Komitmen Terhadap Kompetensi | 3.75 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |
| C | Kepemimpinan yang Kondusif | 3.88 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |
| D | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | 3.50 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |
| E | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | 3.67 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |
| F | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | 3.71 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |
| G | Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif | 3.80 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |
| H | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | 3.50 | Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain |

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil survey persepsi yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan pada awal periode tahun 2025, meskipun secara umum lingkungan pengendalian sudah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mendukung penciptaan budaya pengendalian risiko yang lebih efektif di pemerintah daerah. Oleh karena itu, berikut adalah rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang diusulkan:

1. Penguatan Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - Mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Bappelitbangda.
 - Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai terkait dengan pengelolaan risiko.
 - Mendorong partisipasi aktif pegawai dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Pegawai
 - Menggelar kampanye kesadaran tentang pentingnya pengendalian risiko dan peran masing-masing pegawai dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif.
 - Membentuk tim khusus atau komite pengendalian risiko yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unit kerja di Bappelitbangda untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian risiko.
 - Mendorong terciptanya budaya terbuka dan kolaboratif di antara pegawai dalam berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan manajemen risiko.
3. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kepemimpinan
 - Memberikan pelatihan khusus kepada pimpinan dan manajer di Bappelitbangda tentang konsep dan praktik terkait dengan kepemimpinan yang mendukung budaya pengendalian risiko.
 - Mendorong para pimpinan untuk menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip pengendalian risiko dalam pengambilan keputusan dan manajemen operasional sehari-hari.
4. Evaluasi dan Pemantauan Berkala
 - Menetapkan sistem evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi rencana perbaikan lingkungan pengendalian untuk memastikan efektivitasnya.
 - Melakukan peninjauan rutin terhadap capaian-capaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan lingkungan pengendalian di Bappelitbangda.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Konteks Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan | |
| Tahun Penilaian | 2025 | |
| Periode yang Dinilai | 2025 | |
| Urusan Pemerintahan | Perencanaan pembangunan, litbang | |
| OPD yang Dinilai | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| Sumber Data | Rancangan Awal Renstra 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| Tujuan Strategis | Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa | |
| Sasaran Strategis | 1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan 2. Meningkatnya Inovasi Daerah 3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | |
| IKU Renstra OPD | IKU | Target |
| | 1 Prosentase Indikator Kinerja Daerah Yang Tercapai | 91,18% |
| | 2 Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Tercapai | 86,36% |
| | 3 Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai | 96,01% |
| | 4 Indeks Inovasi Daerah (IID) | 78,25 |
| | 5 Nilai SAKIP Bappelitbangda | 91,74 |

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta risiko sebagai berikut, yang terdiri dari:

● Risiko Strategis Organisasi (RSO)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|--|---|--|-----------------|-----------------------|---|---|------|---|-----------------------------------|
| | | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak Yang Terkena |
| Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan | Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai | Tren perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak terprediksi | RSO.25.36.10.01 | Kepala Bappelitbangda | Kondisi force majeure yang tidak dapat dikendalikan | SDM, Teknologi, Metode, Kondisi Ekonomi | UC | Kinerja perencanaan pembangunan daerah tidak mencapai target | Kepala Daerah & Masyarakat |
| | | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik | RSO.25.36.10.02 | Kepala Bappelitbangda | Kendala teknis pada system evaluasi dan pelaporan yang digunakan | SDM, Teknologi, Metode | C | Kegiatan monitoring berkala tidak berjalan dengan optimal dan pelaporan tidak tepat waktu | Kepala Daerah & Masyarakat |
| | Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai | Perubahan kebijakan anggaran prioritas perangkat daerah | RSO.25.36.10.03 | Kepala Bappelitbangda | Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah | Anggaran, SDM, Kondisi Ekonomi | C | Pelaksanaan program prioritas perangkat daerah tidak berjalan secara optimal | Perangkat Daerah dan Masyarakat |
| | | Monitoring dan pelaporan kinerja perangkat daerah tidak berjalan dengan optimal | RSO.25.36.10.04 | Kepala Bappelitbangda | Kendala teknis pada system evaluasi dan pelaporan yang digunakan, serta kurang maksimalnya koordinasi dengan perangkat daerah | SDM, Teknologi, Metode | C | Kegiatan monitoring berkala tidak berjalan dengan optimal dan pelaporan tidak tepat waktu | Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| | Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai | Perubahan kebijakan anggaran program perangkat daerah | RSO.25.36.10.05 | Kepala Bappelitbangda | Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam | SDM, Teknologi, Metode | C | Pelaksanaan program prioritas perangkat daerah tidak berjalan secara optimal | Bappelitbangda & Perangkat Daerah |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------------|---|----------------------------------|------|---|-----------------------------------|
| | | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak Yang Terkena |
| | | | | | kegiatan pemantauan dan evaluasi program. | | | | |
| | | Monitoring dan pelaporan program pembangunan tidak berjalan dengan optimal | RSO.25.36.10.06 | Kepala Bappelitbangda | Kendala teknis pada system evaluasi dan pelaporan yang digunakan, serta kurang maksimalnya koordinasi dengan perangkat daerah | SDM, Teknologi, Metode | C | Kegiatan monitoring berkala tidak berjalan dengan optimal dan pelaporan tidak tepat waktu | Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Implementasi program inovasi daerah tidak berjalan secara berkelanjutan | RSO.25.36.10.07 | Kepala Bappelitbangda | Dukungan sumber daya dan komitmen pimpinan terhadap implementasi inovasi yang kurang | SDM, Teknologi, Metode | C | Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam instansi terkait terhambat | Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| | | Legitimasi inovasi pelayanan publik yang kurang | RSO.25.36.10.08 | Kepala Bappelitbangda | Kurang maksimalnya tata kelola administrasi dan birokrasi dalam implementasi inovasi | SDM, Teknologi, Metode, Anggaran | C | Inovasi pelayanan publik yang diciptakan tidak dapat diimplementasikan dengan optimal | Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| | | Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan tidak dapat diakomodir dalam perumusan kebijakan daerah | RSO.25.36.10.09 | Kepala Bappelitbangda | Penelitian yang dilakukan tidak didasarkan pada isu yang berkembang dan prioritas pembangunan daerah | SDM, Teknologi, Metode | C | Penelitian dan kajian yang dihasilkan tidak menghasilkan dampak dalam pembangunan daerah | Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Bappelitbangda | Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah | RSO.25.36.10.10 | Kepala Bappelitbangda | Kurangnya pelatihan manajerial dan pengembangan kapasitas SDM | SDM, Teknologi, Metode | C | Kualitas kinerja aparatur mengalami penurunan | Bappelitbangda |
| | | Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif | RSO.25.36.10.11 | Kepala Bappelitbangda | Dukungan anggaran dan sumber daya yang kurang | SDM, Teknologi, Metode, Anggaran | C | Pemantauan kinerja dan pelaporan menjadi terhambat dan tidak tepat waktu | Bappelitbangda |

● **Risiko Operasional Organisasi (ROO)**

| Kegiatan | Indikator Kinerja | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|--|--|-------------|---|-----------------|---------------------------|---|------------------------|------|---|---------------------------------|
| | | Tahapan | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak Yang Terkena |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu | Pelaporan | Risiko Kepatuhan: Keterlambatan dalam pelaporan capaian kinerja secara berkala | ROO.25.36.10.01 | Sekretaris Bappelitbangda | Kurangnya optimalnya koordinasi dan mekanisme pelaporan capaian kinerja berkala | SDM, Teknologi, Metode | C | Hasil evaluasi tidak dapat dilaporkan dengan tepat waktu dan kegiatan tidak dapat dievaluasi secara actual dan faktual | Kepala & Pegawai Bappelitbangda |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu | Evaluasi | Risiko Fraud: Adanya temuan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai | ROO.25.36.10.02 | Sekretaris Bappelitbangda | Kurang tertibnya administrasi pelaksanaan kegiatan pada aspek keuangan | SDM, Teknologi, Metode | C | Pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat | Kepala & Pegawai Bappelitbangda |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Kepegawaian | Pelaksanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Program pengembangan sumber daya manusia tidak optimal | ROO.25.36.10.03 | Sekretaris Bappelitbangda | Kurang tertibnya tata administrasi kepegawaian dan peta pengembangan kompetensi pegawai | SDM, Teknologi, Metode | C | Menurunnya kualitas SDM aparatur di perangkat daerah | Kepala & Pegawai Bappelitbangda |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa | Pelaksanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah | ROO.25.36.10.04 | Sekretaris Bappelitbangda | Sistem administrasi yang tidak terorganisir, dan kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi | SDM, Teknologi, Metode | C | Lambatnya proses administratif, potensi kehilangan data, dan kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar. | Kepala & Pegawai Bappelitbangda |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa | Pelaksanaan | Risiko Kemitraan: Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. | ROO.25.36.10.05 | Sekretaris Bappelitbangda | Kurangnya klarifikasi dan komunikasi yang jelas terkait spesifikasi barang. | SDM, Teknologi, Metode | C | Penurunan kualitas pelayanan atau proyek yang menggunakan barang tersebut. Potensi kerugian finansial akibat pengadaan ulang atau perbaikan barang. | Kepala & Pegawai Bappelitbangda |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pelayanan yang Tersedia Dengan Baik | Pelaksanaan | Risiko Kemitraan: Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan | ROO.25.36.10.06 | Sekretaris Bappelitbangda | Kurangnya koordinasi antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. | SDM, Teknologi, Metode | C | Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Penurunan efisiensi dalam pelaksanaan | Kepala & Pegawai Bappelitbangda |

| Kegiatan | Indikator Kinerja | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|-------------|---|-----------------|--|---|----------------------------------|------|---|--|
| | | Tahapan | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak Yang Terkena |
| | | | pemerintahan daerah | | | | | | urusan pemerintahan. | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pelaksanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi. | ROO.25.36.10.07 | Sekretaris Bappelitbangda | Kurangnya perencanaan pemeliharaan preventif, kurangnya anggaran untuk pemeliharaan, atau kurangnya staf yang terlatih. | SDM, Teknologi, Metode | C | Kerusakan barang yang tidak terduga, penurunan kinerja, dan biaya pemeliharaan yang tidak terduga. | Kepala & Pegawai Bappelitbangda |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu | Perencanaan | Risiko Kebijakan: Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan | ROO.25.36.10.08 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, ketidakpastian anggaran, serta perubahan kebijakan yang mendadak. | SDM, Teknologi, Metode | C | Tidak tercapainya kinerja atau program yang direncanakan, ketidakpastian anggaran, dan penurunan kepercayaan stakeholder. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dianalisis | Perencanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya kualitas analisis data | ROO.25.36.10.09 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya keahlian analisis data, keterbatasan akses data yang akurat, atau kurangnya penggunaan teknologi informasi. | SDM, Teknologi, Metode, Anggaran | C | Kesalahan interpretasi data, perencanaan yang tidak berbasis bukti, dan penurunan kualitas keputusan perencanaan. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan | Perencanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi | ROO.25.36.10.10 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya pengembangan sistem evaluasi kinerja, kurangnya pengawasan, atau tidak adanya mekanisme pelaporan yang efektif. | SDM, Teknologi, Metode, Anggaran | C | Ketidakjelasan terkait pencapaian sasaran, kesulitan dalam perbaikan kebijakan, dan penurunan akuntabilitas. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang | Perencanaan | Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan | ROO.25.36.10.11 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kurangnya komunikasi antarbidang, perbedaan prioritas, dan kurangnya pemahaman | SDM, Teknologi, Metode | C | Tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |

| Kegiatan | Indikator Kinerja | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|--|--|---------------------|--|-----------------|---|--|------------------------|------|--|--|
| | | Tahapan | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak Yang Terkena |
| | Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | pembangunan manusia | | | tentang kebutuhan masyarakat. | | | peningkatan kesenjangan pembangunan. | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Perencanaan | Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam | ROO.25.36.10.12 | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Keterbatasan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan aspirasi masing-masing sektor, kurangnya dialog dan pertukaran informasi antarbidang, atau kurangnya mekanisme kolaboratif dalam perencanaan. | SDM, Teknologi, Metode | C | Ketidakselarasan kebijakan sektoral, potensi tumpang tindih proyek-proyek pembangunan, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor terkait. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Perencanaan | Risiko Kebijakan: Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat | ROO.25.36.10.13 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kurangnya koordinasi antarbidang, ketidaksesuaian prioritas pembangunan, atau kurangnya pemahaman tentang dinamika wilayah. | SDM, Teknologi, Metode | C | Pembangunan infrastruktur yang tidak optimal, ketidaksesuaian dengan tata ruang kawasan, dan meningkatnya tekanan pada sumber daya alam. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Pertanggung-jawaban | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan | ROO.25.36.10.14 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman terkait implikasi hasil penelitian, atau kebijakan yang kaku | SDM, Metode | C | Inovasi kebijakan tidak dapat diimplementasikan | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan | Pertanggung-jawaban | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang social dan kependudukan | ROO.25.36.10.15 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Riset tidak didasarkan pada isu-isu terkini di bidang pembangunan social dan kependudukan. | SDM, Teknologi, Metode | C | Riset yang tidak relevan atau tidak dapat menjawab tantangan pembangunan social yang aktual. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |

| Kegiatan | Indikator Kinerja | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|--|--|---------------------|---|-----------------|---|---|----------------------------------|------|---|--|
| | | Tahapan | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak Yang Terkena |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Pertanggung-jawaban | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan | ROO.25.36.10.16 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Riset tidak didasarkan pada isu-isu terkini di bidang pembangunan ekonomi. | SDM, Teknologi, Metode | C | Riset yang tidak relevan atau tidak dapat menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang aktual. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dikembangkan | Pertanggung-jawaban | Risiko Kebijakan: Inovasi yang dikembangkan tidak dapat diimplementasikan secara berkelanjutan | ROO.25.36.10.17 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Kurangnya dukungan sumber daya dan komitmen pimpinan dalam implementasi inovasi | SDM, Teknologi, Metode, Anggaran | C | Terhambatnya adopsi teknologi modern, kesulitan dalam meningkatkan efisiensi, dan kurangnya daya saing dalam menghadapi tantangan global. | Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah |

C. Hasil Analisis Risiko

● Skala Risiko

| Skala Nilai Risiko | Kategori | Penerimaan Risiko | Tindakan |
|--------------------|---------------|---|---|
| 1,00 - 2,00 | Sangat Rendah | Dapat diterima | Tidak diperlukan tindakan |
| 2,01 - 4,00 | Rendah | Dapat diterima | Tidak diperlukan tindakan |
| 4,01 - 9,00 | Sedang | Diperlukan pengendalian yang lebih baik | Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya |
| 9,01 - 12,00 | Tinggi | Harus menjadi perhatian manajemen | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko |
| 12,01 - 25,00 | Sangat Tinggi | Tidak dapat diterima | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko |

● **Hasil Analisis Risiko**

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta penilaian risiko sebagai berikut:

| Risiko | | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Uraian | Kode | | | |
| Tren perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak terprediksi | RSO.25.36.10.01 | 3 | 2 | 6 |
| Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik | RSO.25.36.10.02 | 4 | 3 | 12 |
| Perubahan kebijakan anggaran prioritas perangkat daerah | RSO.25.36.10.03 | 3 | 3 | 9 |
| Monitoring dan pelaporan kinerja perangkat daerah tidak berjalan dengan optimal | RSO.25.36.10.04 | 4 | 3 | 12 |
| Perubahan kebijakan anggaran program perangkat daerah | RSO.25.36.10.05 | 3 | 3 | 9 |
| Monitoring dan pelaporan program pembangunan tidak berjalan dengan optimal | RSO.25.36.10.06 | 4 | 3 | 12 |
| Implementasi program inovasi daerah tidak berjalan secara berkelanjutan | RSO.25.36.10.07 | 3 | 2 | 6 |
| Legitimasi inovasi pelayanan publik yang kurang | RSO.25.36.10.08 | 3 | 2 | 6 |
| Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan tidak dapat diakomodir dalam perumusan kebijakan daerah | RSO.25.36.10.09 | 3 | 3 | 9 |
| Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah | RSO.25.36.10.10 | 3 | 2 | 6 |
| Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif | RSO.25.36.10.11 | 3 | 2 | 6 |

| Risiko | | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
|---|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Uraian | Kode | | | |
| Risiko Kepatuhan: Keterlambatan dalam pelaporan capaian kinerja secara berkala | ROO.25.36.10.01 | 4 | 1 | 4 |
| Risiko Fraud: Adanya temuan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai | ROO.25.36.10.02 | 4 | 1 | 4 |
| Risiko Operasional Kegiatan: Program pengembangan sumber daya manusia tidak optimal | ROO.25.36.10.03 | 4 | 2 | 8 |
| Risiko Operasional Kegiatan: Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah | ROO.25.36.10.04 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Kemitraan: Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. | ROO.25.36.10.05 | 4 | 2 | 8 |
| Risiko Kemitraan: Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | ROO.25.36.10.06 | 3 | 1 | 3 |
| Risiko Operasional Kegiatan: Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi. | ROO.25.36.10.07 | 3 | 1 | 3 |
| Risiko Kebijakan: Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan | ROO.25.36.10.08 | 3 | 3 | 9 |
| Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya kualitas analisis data | ROO.25.36.10.09 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi | ROO.25.36.10.10 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | ROO.25.36.10.11 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam | ROO.25.36.10.12 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Kebijakan: Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat | ROO.25.36.10.13 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan | ROO.25.36.10.14 | 3 | 3 | 9 |

| Risiko | | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko |
|---|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Uraian | Kode | | | |
| Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang social dan kependudukan | ROO.25.36.10.15 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan | ROO.25.36.10.16 | 3 | 2 | 6 |
| Risiko Kebijakan: Inovasi yang dikembangkan tidak dapat diimplementasikan secara berkelanjutan | ROO.25.36.10.17 | 2 | 3 | 6 |

D. Rencana Tindak Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Berdasarkan uraian risiko yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pengendalian yang sudah dilakukan, celah pengendalian dan pengendalian yang masih dibutuhkan. Berikut ini daftar uraian rencana tindak pengendalian atas risiko di lingkup Bappelitbangda Kabupaten Lamongan:

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|--|--|-----------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|
| Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: | | | | | | | |
| 1 | Tren perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak terprediksi | RSO.25.36.10.01 | Menerapkan sistem pelaporan yang efisien dan terstruktur untuk memantau perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi. | Keterlambatan dalam pelaporan atau kurangnya transparansi dalam pertukaran informasi antara berbagai pihak terkait. | Melakukan analisis dan pemantauan secara berkala terhadap update data-data indikator makro ekonomi dan melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah beserta target kinerjanya | Kepala Bappelitbangda | Desember 2025 |
| 2 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik | RSO.25.36.10.02 | Menerapkan system pelaporan kinerja secara up-to-date, baik secara daring maupun luring | Keterlambatan dalam pelaporan data capaian kinerja | Meningkatkan kualitas pelaporan dan pemeliharaan system evaluasi yang digunakan | Kepala Bappelitbangda | Desember 2025 |
| 3 | Perubahan kebijakan anggaran prioritas perangkat daerah | RSO.25.36.10.03 | Mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan melakukan peninjauan yang berkala dan mendalam terhadap anggaran yang tersedia, serta memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien sesuai dengan tujuan pembangunan. | Kurangnya mekanisme atau prosedur yang jelas dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya, sehingga terjadi risiko pengalokasian yang kurang efisien atau tidak tepat sasaran. | Melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap program prioritas pada setiap perangkat daerah | Kepala Bappelitbangda | Juli 2025 |
| 4 | Monitoring dan pelaporan kinerja perangkat daerah tidak berjalan dengan optimal | RSO.25.36.10.04 | Menerapkan system pelaporan kinerja secara up-to-date, baik secara daring maupun luring, serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap data capaian kinerja yang dilaporkan | Kurangnya keterlibatan atau dukungan dari perangkat daerah atau unit kerja terkait dalam memverifikasi dan menyediakan data yang diperlukan, yang dapat menghambat proses pelaporan yang optimal. | Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat. | Kepala Bappelitbangda | Desember 2025 |
| 5 | Perubahan kebijakan anggaran program perangkat daerah | RSO.25.36.10.05 | Mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan melakukan peninjauan yang berkala dan mendalam terhadap anggaran yang tersedia, serta memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien sesuai dengan tujuan pembangunan. | Kurangnya mekanisme atau prosedur yang jelas dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya, sehingga terjadi risiko pengalokasian yang kurang efisien atau tidak tepat sasaran. | Melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap program prioritas pada setiap perangkat daerah | Kepala Bappelitbangda | Juli 2025 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----|--|-----------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|
| 6 | Monitoring dan pelaporan program pembangunan tidak berjalan dengan optimal | RSO.25.36.10.06 | Menerapkan system pelaporan kinerja secara up-to-date, baik secara daring maupun luring, serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap data capaian kinerja yang dilaporkan | Kurangnya keterlibatan atau dukungan dari perangkat daerah atau unit kerja terkait dalam memverifikasi dan menyediakan data yang diperlukan, yang dapat menghambat proses pelaporan yang optimal. | Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat. | Kepala Bappelitbangda | Desember 2025 |
| 7 | Implementasi program inovasi daerah tidak berjalan secara berkelanjutan | RSO.25.36.10.07 | Mendorong perangkat daerah dalam meningkatkan perbaikan inovasi yang dilaksanakan | Kurangnya komitmen pimpinan dalam alokasi sumber daya | Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada perangkat daerah untuk mendorong kelembagaan inovasi pelayanan publik yang diterapkan | Kepala Bappelitbangda | November 2025 |
| 8 | Legitimasi inovasi pelayanan publik yang kurang | RSO.25.36.10.08 | Mendorong instansi pelayanan publik dalam meningkatkan tata kelola inovasi | Kurangnya pemahaman para innovator terkait pentingnya tata kelola dan administrasi implementasi inovasi | Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada instansi pelayanan publik dalam meningkatkan tata kelola inovasi | Kepala Bappelitbangda | November 2025 |
| 9 | Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan tidak dapat diakomodir dalam perumusan kebijakan daerah | RSO.25.36.10.09 | Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait dalam mengakomodir hasil penelitian | Isu yang dilakukan kajian tidak begitu relevan dengan perkembangan arah kebijakan nasional/daerah | Melakukan pemetaan terhadap isu dan kebijakan dalam menentukan tema dan rumusan masalah penelitian | Kepala Bappelitbangda | Desember 2025 |
| 10 | Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah | RSO.25.36.10.10 | Mengadakan program pengembangan sumber daya manusia terkait dengan kompetensi perencanaan | Implementasi kompetensi yang terkadang tidak selaras dengan kondisi actual | Mengoptimalkan program pengembangan kompetensi dan pemberian reward pada pegawai dengan kinerja baik | Kepala Bappelitbangda | Desember 2025 |
| 11 | Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif | RSO.25.36.10.11 | Memfaatkan system informasi teknologi yang ada secara optimal | Sering terjadi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi | Melakukan optimalisasi penggunaan system dan mendorong penyedia layanan system informasi untuk terus melakukan perbaikan | Kepala Bappelitbangda | Desember 2025 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|--|--|-----------------|--|--------------------|---|--|---------------------------|
| Risiko Operasional OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: | | | | | | | |
| 3 | Risiko Operasional Kegiatan: Program pengembangan sumber daya manusia tidak optimal | ROO.25.36.10.03 | Memberikan pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai. | - | Memperbarui kebijakan kepegawaian, mendorong pegawai untuk aktif dalam kegiatan peningkatan kompetensi, dan memberikan insentif yang sesuai untuk kinerja yang baik. | Sekretaris Bappelitbangda | Agustus 2025 |
| 4 | Risiko Operasional Kegiatan: Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah | ROO.25.36.10.04 | Menerapkan proses administrasi standar yang terdokumentasi untuk mengurangi keragaman dalam prosedur dan mempercepat pemrosesan. | - | Meningkatkan sistem administrasi, mengadopsi teknologi informasi yang lebih baik, dan memastikan adanya cukup sumber daya manusia untuk mendukung fungsi administrasi. | Sekretaris Bappelitbangda | Agustus 2025 |
| 5 | Risiko Kemitraan: Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. | ROO.25.36.10.05 | Menetapkan prosedur pengadaan yang jelas dan terdokumentasi, termasuk persyaratan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia barang atau jasa. | - | Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang sejak awal proses pengadaan. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang. | Sekretaris Bappelitbangda | Agustus 2025 |
| 8 | Risiko Kebijakan: Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan | ROO.25.36.10.08 | Melakukan analisis dan perencanaan anggaran yang cermat untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. | - | Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan melakukan perubahan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Mei 2025 |
| 9 | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya kualitas analisis data | ROO.25.36.10.09 | Melibatkan ahli atau konsultan data yang memiliki keahlian khusus dalam analisis data untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam. | - | Meningkatkan keahlian kualitas data, meningkatkan ketersediaan data yang akurat, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam portal satu data. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | September 2025 |
| 10 | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi | ROO.25.36.10.10 | Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pengendalian yang ada dan membuat perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. | - | Melakukan perbaikan sistem evaluasi kinerja yang efektif, meningkatkan pengawasan, dan menyusun mekanisme pelaporan berkala yang transparan. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Desember 2025 |
| 11 | Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | ROO.25.36.10.11 | Mengadakan pertemuan atau forum koordinasi rutin bersama perangkat daerah mitra bidang PPM | - | Meningkatkan komunikasi antarbidang, menyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi, dan menyusun rencana strategis bersama antara bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | September 2025 |
| 12 | Risiko Kebijakan: Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang | ROO.25.36.10.12 | Melakukan koordinasi reguler antara unit-unit atau departemen terkait untuk | - | Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah mitra bidang dengan mengadakan pertemuan berkala dan | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | September 2025 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------|---|---|--|---|----------------|
| | perekonomian dan sumber daya alam | | berbagi informasi, menyinkronkan kegiatan | | melakukan asistensi dalam penyusunan perencanaan strategis pada mitra perangkat daerah | | |
| 13 | Risiko Kebijakan: Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat | ROO.25.36.10.13 | Menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi di tingkat wilayah. | - | Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah mitra bidang dengan mengadakan pertemuan berkala dan melakukan asistensi dalam penyusunan perencanaan strategis pada mitra perangkat daerah | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | September 2025 |
| 14 | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan | ROO.25.36.10.14 | Menjalin kerjasama dengan perangkat daerah terkait untuk mengakomodir rekomendasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan | - | Mendorong pimpinan dan stakeholders untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Desember 2025 |
| 15 | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang social dan kependudukan | ROO.25.36.10.15 | Menjalin kerjasama dengan perangkat daerah terkait untuk mengakomodir rekomendasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan | - | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Desember 2025 |
| 16 | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan | ROO.25.36.10.16 | Menjalin kerjasama dengan perangkat daerah terkait untuk mengakomodir rekomendasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan | - | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Desember 2025 |
| 17 | Risiko Kebijakan: Inovasi yang dikembangkan tidak dapat diimplementasikan secara berkelanjutan | ROO.25.36.10.17 | Melakukan pendampingan terhadap unit pelayanan publik dalam implementasi inovasi | - | Mendorong pimpinan unit pelayanan publik dan innovator terkait untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dalam implementasi inovasi secara berkelanjutan | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | Desember 2025 |

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam konteks Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda), rancangan informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam mendukung efektivitas pengendalian risiko. Berikut adalah deskripsi dari berbagai elemen rancangan informasi dan komunikasi yang diperlukan:

1. Rapat Koordinasi Internal
2. Surat Edaran
3. Bimbingan Teknis
4. Monitoring Implementasi
5. Pelatihan dan Diklat
6. Sistem Aplikasi
7. Sosialisasi
8. Pengaturan MOU
9. Kontrak
10. Proposal, dan
11. Kebijakan

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Mekanisme pemantauan yang akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau dengan tepat dan pengendalian yang telah dirancang dapat dijalankan dan berjalan efektif. Mekanisme pemantauan yang akan digunakan meliputi:

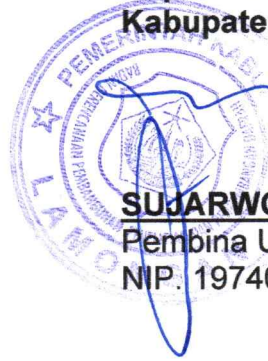
1. Konfirmasi Persiapan:
Sebelum pelaksanaan setiap kegiatan atau proyek, akan dilakukan konfirmasi persiapan untuk memastikan bahwa semua pengendalian yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Konfirmasi persiapan melibatkan verifikasi bahwa langkah-langkah mitigasi risiko yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan:
Setelah kegiatan atau proyek selesai dilaksanakan, akan disusun laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap implementasi pengendalian risiko yang telah direncanakan. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan memuat informasi mengenai pelaksanaan pengendalian, potensi permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan.

VI. PENUTUP

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda) telah menguraikan dan menerapkan berbagai strategi dan mekanisme pengendalian risiko yang telah dirancang. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh jajaran, diharapkan upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sebagai penutup, kami ingin menyatakan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan implementasi penilaian risiko serta pengelolaan risiko di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Lamongan. Dengan kerjasama dan dedikasi dari semua pihak, kami yakin bahwa Bappelitbangda Kabupaten Lamongan akan terus menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2025
**Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Lamongan**



SUJARWO, ST., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005